



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL Pencarian
DAN PERTOLONGAN/BASARNAS**

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke – 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Rabu, 28 Agustus 2024
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.10 WIB s.d 12.10 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: Membahas RKA K/L TA. 2025 Kementerian PUPR, dalam Nota Keuangan RAPBN TA. 2025.
Ketua Rapat	: Roberth Rouw
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR hari ini adalah Membahas RKA K/L TA. 2025 Kementerian PUPR, dalam Nota Keuangan RAPBN TA. 2025.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri PUPR untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian PUPR terhadap alokasi anggaran Kementerian PUPR dalam RAPBN TA 2025 berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor: S-612/MK.02/2024 dan B-480/D.8/PP.04.03/07/2024 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran (TA) 2025, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga TA 2025 sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

KEMENTERIAN	PAGU KEBUTUHAN	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2025	SELISIH
	A	B	(A-B)
Kementerian PUPR	136.944.971.043	75.632.263.316	61.312.707.727

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian PUPR akan memperjuangkan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 61,31 Triliun sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN TA 2025 di DPR RI.

2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar:
 - a. menyesuaikan alokasi pagu anggaran RAPBN TA 2025 sesuai dengan usulan dan saran Komisi V DPR RI dan akan dibahas lebih rinci dengan Unit Organisasi Eselon I pada rapat yang akan datang;
 - b. mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat di RAPBN TA 2025;
 - c. meningkatkan upaya penanganan sampah perkotaan; dan
 - d. mendorong keterlibatan partisipasi publik dalam pembangunan Jalan Tol.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.10 WIB.

Jakarta, 28 Agustus 2024

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,**

ttd

M. BASOEKI HADIMOELJONO

KETUA RAPAT,

ttd

ROBERTH ROUW